

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta : RIneka Cipta, 2010).
- Gatot Suparmono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012).
- H. Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).
- Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).
- Maroni. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. (Bandar Lampung: CV. Anugrag Utama Raharja, 2015).
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2010).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981).

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*

2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Indonesia. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).*

### **C. Putusan Peradilan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.* (Jakarta, Sekretariat Jenderal MK RI, 2003).

### **D. Artikel jurnal, majalah dan makalah**

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum (Hak Menguasai Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).* (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I: Jakarta, 2007).

Barda Nawawi Arief. "Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi". Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2002).

Bintoro Saputro et al. "Pengaruh aktivitas Penambangan Timah Putih (Sn) Terhadap Kerusakan Lingkungan Perairan Sungai Jelitik Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung". *Majalah Geografi Indonesia*, Vol. 28, Nomor 1, Tahun 2014.

Dati Nuryanti. *Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Pertambangan, Kewenangan Pemerintahan Daerah Dan Izin Usaha Pertambangan.* (Universitas Pasundan, 2016).

Fitri Ramdhani Harahap. "Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka". *Jurnal Society*, Volume VI, Nomor 1, Tahun 2016.

Indriyanto Seno Adji. "Asas Asas Hukum Pidana & Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini". Makalah disampaikan pada Pelatihan Pidana & Kriminologi (Yogyakarta: The Rich Hotel, 2014).

Ridwan. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". *Kanun Jurnal Hukum*, No. 60 Th. XV Agustus, Tahun 2013.

Untung Setyahadi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Study Kasus Normalisasi Kali

Bebeng Kabupaten Magelang)”. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12  
No. 2 Juni Tahun 2017.

**E. Internet**

Anonim. [www.sipp.pn-tanjungpandan.go.id](http://www.sipp.pn-tanjungpandan.go.id). 5 April 2020.